

ISBN 978-979-15786-1-5

Praningsih



**Pengarusutamaan Gender
dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan**



PROSIDING

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN MENUJU KUALITAS KEHIDUPAN
BERKELANJUTAN**

Senin, 10 September 2007
Auditorium Rektorat IPB
Bogor, Jawa Barat

Editor:

Dr. Titik Sumarti

Dr. Saharuddin

Dr. Siti Amanah

Desain Cover dan Tata Letak:
Mahmudi Siwi

© Fakultas Ekologi Manusia – IPB, Bogor
Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh
Fakultas Ekologi Manusia – IPB
Bogor, Desember 2007

ISBN: 978-979-15786-1-5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
SAMBUTAN REKTOR IPB	
SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI	
RUMUSAN HASIL SEMINAR DAN DISKUSI KELOMPOK	
Gagasan Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Strategis Fakultas Ekologi Manusia IPB	
Dr. Ir. Titik Sumarti, MS.....	1
Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan Melalui Pemberdayaan Perempuan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal (<i>The Combat of Poverty and Hungeriness Through Woman Impowerment with the Basis of Local Resources</i>)	
Dr. Hertomo Heroe	33
Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Lanjut Usia	
Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, MS	43
Pengembangan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berwawasan Gender	
Dr. Ir. Aida Vitayala Hubeis, MS	51
Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	
Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS	57
Pengarusutamaan Perempuan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan	
Dr. drh. Clara M. Kusharto, MSc, Dewi Permaesih, Fitrah Ernawati, Nurdin.....	69
Status Wanita dan Perbaikan Status Gizi Anak (<i>Women's Status and The Improvement of Children's Nutritional Status</i>)	
Ir. Dodik Briawan, MCN.....	75
Gagasan Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pengembangan Pendidikan (<i>Developing An Integrated Gender Mainstreaming Program In Education: A Framework For Action</i>)	
Dr. Ir. Dwi Hastuti, MSc.....	85
Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Dalam Menyongsong Era Globalisasi	
Dr. Ir. Herien Puspitawati, MSc, MSc	97
Hubungan Persepsi Gender Mahasiswa dengan Pilihan Program Studi (Studi Kasus pada Mahasiswa dan Mahasiswi Tingkat Persiapan Bersama Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Tahun Ajaran 2002/2003)	
Widya Andharie Rahasthera, MSi dan Ir. Nuraini W Prasadjo, MS	115

Kekerasan Gender di Sekolah Dominan Laki-Laki: Kajian Terhadap Siswi SMK "Bina Teknologi" Purwokerto, Kabupaten Banyumas (<i>Gender Violence in Male Dominant School: Analysis of Women Student of SMK "Bina Teknologi" Purwokerto, Kabupaten Banyumas</i>) Dyah Retna Puspita, MSi dan Bambang Kuncoro, MSi	131
Pengarusutamaan Gender dan Ketahanan Pangan (<i>Gender Mainstreaming and Food Security</i>) Yayuk Farida Baliwati	139
Revitalisasi Peran dan Peluang Wanita Tani Menuju Pencapaian Ketahanan Pangan Rumahtangga Petani di Perdesaan Roosganda Elizabeth, MSi.....	151
Masalah Agraria dan Kemiskinan di Indonesia (<i>The Agrarian Problems And Poverty In Indonesia</i>) Martua Sihaloho, SP.,MSi dan Dr. Ir. MT. Felix Sitorus, MS.....	161
Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut: Kasus di Dua Desa Pesisir dengan Kondisi Sosio Budaya yang Berbeda Dr. Ir. Siti Amanah, MS.....	171
Pengintegrasian Isu Gender dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan Dr. Ir. Herien Puspitawati, MSc, MSc	185
Pengarusutamaan Gender dalam Managemen Sumberdaya Keluarga dan Diversifikasi Pendapatan Rumahtangga Petani di Perdesaan: Antara Harapan dan Kenyataan Roosganda Elizabeth, MSi.....	203
Reinterpretasi Strategi Nafkah (<i>Livelihood Strategies</i>) Buruh Migran Perempuan Tyas Retno Wulan, MSi	213
Partisipasi Perempuan dalam Mengetas Kemiskinan Melalui PPMK Defina, MSi.....	223
Gender dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Kritik Atas Translasi, Pengarusutamaan, dan Rumusan Masalah Gender (<i>Gender in Poverty Reduction Projects Critiqucs on Gender's Translation, Mainstreaming and Problem Construction</i>) Ivanovich Agusta, SP., MSi	235
Gerakan Konservasi Perempuan Nyungcung: Hasil Interaksi Antara Kemiskinan, Budaya Patriarki, dan Pengaruh Ornop Ulfa Hidayati, MSi	243

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MENGETAS KEMISKINAN MELALUI PPMK

Defina, MSi

PENDAHULUAN

Latar belakang

Masyarakat miskin ada di mana-mana, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Penduduk miskin menyebar, ada yang di kota-kota dan ada juga yang di desa-desa. Berdasarkan data PBB tahun 2007, 1/3 penduduk di dunia hidup di bawah garis kemiskinan dan 70 persen dari mereka adalah perempuan (prolog. jurnal perempuan edisi 42).

Begitu juga dengan Indonesia, sebagai negara berkembang, Indonesia juga dihadapi oleh masalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin terus meningkat. Kemiskinan ini banyak terjadi di desa-desa dan di kota-kota besar. Kemiskinan yang dialami penduduk desa mendorong mereka untuk datang ke kota-kota besar (Mose, 2003). Pada tahun 2004 saja, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 34 juta jiwa (Kompas Cyber Media, 2005). Sementara itu, berdasarkan susenas BPS Maret 2006, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 39,05 juta jiwa atau 17,75 persen dari total penduduk Indonesia (Batam Pos September 2006).

Kemiskinan ini salah satunya disebabkan tidak adanya lapangan pekerjaan. Dalam kurun waktu 2000-2002, jumlah pengangguran perempuan mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 jumlah pengangguran perempuan 2 juta jiwa. Angka ini naik menjadi 8,8 juta jiwa tahun 2001 dan 9,2 juta jiwa tahun 2002 (Katalog BPS 3425, 2002).

Hal ini pulalah yang dialami Jakarta. Sebagai ibukota negara dan kota metropolitan, Jakarta menjadi tujuan urbanisasi. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan penduduk di Jakarta. Dalam rentang tahun 1961-2000, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan. Pada tahun 1961 jumlah penduduk Jakarta 2,91 juta jiwa menjadi 54,55 juta jiwa (1971), 6,48 juta jiwa (1990) dan bertambah lagi menjadi 8,23 juta jiwa pada tahun 1990 (info penduduk, sensus penduduk 2000).

Bertambahnya jumlah penduduk di DKI menyebabkan terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Jakarta 8 ribu KK atau 370 ribu jiwa pada tahun 2000 menjadi 370.898 jiwa atau 91.461 KK miskin pada tahun 2004. Penduduk miskin ini menyebar, namun banyak terdapat di Jakarta Utara dan Jakarta Timur yang mencapai ratusan ribu (Kompas Cyber Media, 21 April 2005).

Berdasarkan data di atas, muncul pertanyaan, mengapa jumlah penduduk miskin terus bertambah, padahal pemerintah Indonesia dan Jakarta khususnya sudah melaksanakan pembangunan? Untuk itu, perlu kita lihat lagi makna pembangunan dan usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan Jakarta khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Ketika kita berbicara tentang pembangunan, yang tergambar dalam pikiran kita adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya pendapat masyarakat. Keberhasilan pembangunan ini pun dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional, yakni dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional (GNP) perkapita riil. Artinya, tingkat pertumbuhan nasional dalam harga konstan harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk. Namun, apakah benar pembangunan itu hanya dalam bidang ekonomi? Bagaimana dengan bidang yang lainnya. Begitu pula kaitannya dengan perempuan, apakah pembangunan hanya menjadikan perempuan objek ataukah subjek, yakni dilibatkan dalam pembangunan? Apakah perempuan bisa menikmati hasil pembangunan itu sama dengan laki-laki? Hal inilah yang selalu dibahas dalam setiap kesempatan diskusi tentang perempuan.

Sehubungan dengan topik yang diangkat dalam lokakarya "Pengarutamaan gender dalam pengelolaan sumber daya lingkungan menuju kualitas kehidupan berkelanjutan" dan pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis membatasi pembahasan pada partisipasi perempuan dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Rumusan Masalah

Kelurahan Kelender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sudah banyak mendapat bantuan untuk menanggulangi kemiskinan. Bantuan tersebut dalam bentuk program, seperti JPS, PDM-DKE, P2KP dan PPK. Namun demikian, jumlah penduduk miskin masih banyak, bahkan semakin bertambah, yaitu 413KK miskin atau 1.420 penduduk miskin pada tahun 2000 menjadi 703 KK miskin atau 2.541 jiwa penduduk miskin pada tahun 2002 (BPS DKI, <http://bps.jakarta.go.id>)

Pada tahun 2001 Kelurahan Kelender terpilih menjadi *pilot project* untuk program PMK dengan anggaran Rp 1 miliar. Sebagai program baru, perlu dilihat betul apakah program tersebut diterima oleh masyarakat dan membantu menanggulangi masalah kemiskinan, terutama perempuan dan partisipasi perempuan. Jadi, apakah perempuan berpartisipasi pada PPMK.

Tujuan Penulisan

Berdasarkan tema lokakarya, tujuan penulisan ini adalah:

1. Mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam PPMK
2. Gambaran partisipasi perempuan dalam mengetas kemiskinan melalui PPMK
3. Mendeskripsikan kendala partisipasi perempuan dalam PPMK.

Metode

Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2005-2006. Penelitiannya dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan ini karena kualitatif dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai keadaan dan kondisi objek yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000:3) bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Gambaran itu diperoleh melalui wawancara.

Untuk mendapatkan data, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan. Pengambilan informan ini dengan teknik bola salju (*snowball sampling*). Jumlah informan pada awalnya sedikit kemudian menjadi banyak berdasarkan informasi informan pertama.

Setelah melakukan penelitian, informan yang berhasil diwawancarai adalah lurah, Ketua Dekel, LSM, TPK, Tokoh masyarakat, RT dan 40 orang warga Kelurahan Kelender (laki-laki dan perempuan).

Lokasi

Penelitian dilakukan di RW Kumuh (RW 01, 02, dan 03) di Kelurahan Kelender, Kecamatan Jakarta Timur pada tahun 2005-2006.

Sekilas tentang PPMK

Program Pembangunan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sejak tahun 2001. Sumber dana kegiatan ini dialokasikan dari APBD DKI. Pelaksanaan program ini berdasarkan SK Gubernur DKI No. 1561/2002. SK ini diperbarui lagi, yakni dikeluarkannya SK Gubernur No. 1747/2003 tentang perubahan lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1561/2002 tentang pedoman pelaksanaan PPMK dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan, Provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2007.

Sebelum PPMK direalisasikan, terlebih dahulu dibentuk dewan kelurahan (Dekel). Salah satu tujuannya adalah membantu lurah dalam melaksanakan pembangunan, seperti penanggung jawab pelaksanaan PPMK. Setelah Dekel terbentuk, dibentuk lagi tim pelaksana kegiatan (TPK) dan unit pengelola keuangan (UPK) di tingkat RW. Pembentukan TPK dan UPK berdasarkan musyawarah warga, yaitu masing-masing RT mengirimkan dua orang utusannya untuk duduk di TPK/UPK. Pelaksanaan PPMK didampingi oleh LSM

Bentuk kegiatan PPMK menggunakan pendekatan tribina, yaitu: bina sosial, bina fisik dan bina ekonomi. Jadi, bantuan langsung yang diberikan oleh Pemda melalui Dekel dalam bentuk ketiga bina ini. Namun, dana yang dialokasikan untuk bina ekonomi minimal 60 persen, biaya operasional pengelolaan (OPL) Rp20 juta dan sisanya untuk bina fisik dan bina sosial.

Kerangka Teori

Untuk melihat gambaran partisipasi perempuan dalam meneges kemiskinan pada PPMK, sebagai salah satu program pembangunan, penulis perlu menguraikan sedikit teori yang digunakan, yaitu, kemiskinan, pembangunan dan partisipasi.

1. Kemiskinan

Sebelum kita membahas partisipasi perempuan dalam meneges kemiskinan melalui PPMK, terlebih dahulu kita batasi pengertian kemiskinan tersebut. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan ada di seluruh belahan dunia. Namun, tidak semua kita tahu apa itu kemiskinan. Pengertian kemiskinan seiam ini kita pahami adalah hanya dari segi ekonomi saja. Seperti yang diungkapkan Sumodingrat (1999:2) bahwa kemiskinan adalah tingkat pendapatan seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum individu atau keluarga itu.

Batasan pengertian yang diberikan oleh Sumodingrat ini hanyalah pada kebutuhan dasar saja. Hal ini sama dengan definisi Bank Dunia (Mikelsen 1999: 194) bahwa kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk

memperoleh standar hidup minimal. Akan tetapi, tidak demikian halnya, seperti apa yang diungkapkan Abdullah dan Djaenudin (1993:8) bahwa kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak memperoleh kesempatan untuk memiliki hak dan aset. Definisi yang diberikan Abdullah dan Djaenudin ini lebih luas dan tidak hanya sekedar dari segi ekonomi saja. Hal ini bisa dipahami bahwa hak dimaksud, salah satunya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kesempatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Salim (1980:41) lebih ringkas mendefinisikan kemiskinan, yaitu kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok di sini bisa dimaknai kebutuhan akan pangan, sandang papan, dan pelayanan (pelayan pendidikan dan kesehatan).

Berdasarkan batas kemiskinan yang diberikan FPMK, yaitu ekonomi, tulisan ini pun menggunakan konsep definisi yang digunakan Salim.

2. Pembangunan Lokal

Kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan. Alasannya, kemiskinan dapat diatasi dengan pembangunan. Namun, bisa juga sebaliknya, kemiskinan timbul karena dampak pembangunan.

Pembangunan bukan hanya membangun ekonomi saja dengan mengabaikan dimensi yang lain. Pada hakekatnya, pembangunan dapat dipahami sebagai proses perubahan terencana yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Seperti yang diungkapkan Katz (Supriatna, 1997:31) bahwa pembangunan pada hakekatnya perubahan terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik.

Sementara itu, Rachbini (1995:64) mengatakan bahwa pembangunan adalah persoalan mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. Pembangunan ini terdistribusi dengan adil. Dengan adanya pembangunan, akan terjadi perubahan yang cepat dan langgeng dalam kapasitas produktif dan organisasi sosial masyarakat. Di sisi lain, Korten (2002:110) mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang anggota-anggota masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengolah sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.

Definisi yang diberikan Korten ternyata tidak hanya peningkatan kapasitas (individu dan institusional), tetapi juga ada pemerataan, berkelanjutan, dan adanya partisipasi masyarakat. Adanya pemerataan dalam pembangunan, yaitu pemerataan dalam pemilikan aset-aset produksi sehingga tidak terjadi kesenjangan antara satu individu dengan individu lainnya (kaya-miskin)

Dari beberapa definisi pembangunan yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh di atas. Tulisan ini menggunakan definisi yang diberikan Korten. Alasannya, definisi yang diberikan Korten mencakup adanya partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan penulisan, yaitu menggambarkan partisipasi perempuan sebagai anggota masyarakat dalam mengentas kemiskinan melalui PPMK.

3. Partisipasi

Kalau dilihat dari sejarah pembangunan yang memerhatikan partisipasi masyarakat, ternyata di dunia telah dicanangkan sejak dekade 1970-an dan diperkuat dengan adanya Deklarasi Manila pada akhir dekade 1980-an. Sementara itu, di Indonesia sendiri, partisipasi sudah ada sejak tahun 1979, yaitu dengan adanya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa dan administrasi desa. Dalam uu tersebut, tergambar adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa melalui musyawarah warga. Selain itu, ada lembaga musyawarah desa yang menampung aspirasi warga untuk membangun desa. Hal ini semakin

diperkuat dengan keluarnya Peraturan Mendagri No. 9 Tahun 1982, diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 serta surat edaran Mendagri No. 50/987/SJ Tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan forum koordinasi pembangunan partisipatif.

Setelah dijelaskan secara ringkas sejarah partisipasi di dunia dan di Indonesia, timbul pertanyaan, apakah sebenarnya partisipasi tersebut. Menurut Soetrisno, belum ada pengertian atau definisi partisipasi yang baku. Meskipun demikian, menurutnya partisipasi memiliki dua definisi, yaitu:

- a. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Tinggi rendahnya partisipasi rakyat di sini diukur dari banyaknya bantuan atau sumbangan yang diberikan oleh rakyat, baik berupa materi maupun tenaga.
- b. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Definisi pertama tersebut menurutnya adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan dan definisi kedua adalah yang berlaku secara universal.

Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan Adi (2003:296-299). Menurut Adi, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan, dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan.

Jadi, untuk melihat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari empat tahap tersebut, yaitu: *assessment*, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tulisan ini, penulis akan menggambarkan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dalam PPMK berdasarkan empat tahap yang diungkapkan Adi.

Partisipasi masyarakat tidak bisa berjalan mulus. Masyarakat dihadapi oleh berbagai kendala dalam berpartisipasi. Kendala tersebut ada berasal dari luar individu ada juga dari luar individu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Watson (Adi, 2003: 306-319) bahwa kendala dalam diri individu ada empat, yakni superego, rasa tidak percaya diri, rasa tidak aman, seleksi ingatan dalam diri individu, sikap apatis dan ketergantungan. Sementara itu, kendala di luar individu adalah hambatan dari masyarakat dan pemerintahan.

PEMBAHASAN

Partisipasi perempuan

Salah satu tujuan PPMK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya partisipasi masyarakat. Perempuan sebagai anggota masyarakat seharusnya juga terlibat dalam PPMK. Untuk lebih jauh gambaran keterlibatan perempuan dalam PPMK, dapat dilihat dalam ketiga bina pada keempat tahap.

1. Bina Sosial

Bantuan langsung yang diberikan pemerintah daerah melalui PPMK untuk bina sosial ini adalah meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan keterampilan yang ada, mereka dapat membuka lapangan kerja. Selain itu, mereka dengan keterampilan yang dimiliki lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Hal ini akan membantu keluarga mereka dalam mengatasi masalah kemiskinan.

a. *Assessment*

Tahap *assessment* merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan PPMK. Pada tahap ini, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhannya sehubungan dengan masalah sosial yang mereka hadapi. Pengidentifikasian ini dilakukan oleh warga di tingkat komunitas yang lebih kecil, yaitu rukun tetangga (RT). Pengidentifikasian masalah pun dilakukan dalam pertemuan bulanan warga RT.

Dari hasil temuan lapangan dan informasi yang diperoleh dari warga, tidak semua warga ikut dalam pertemuan bulanan RT, terutama sekali adalah warga yang berjenis kelamin perempuan. Menurut sebagian mereka, tahap pemetaan masalah hanyalah dilakukan oleh pihak RT dan ada juga sebagian mereka yang mengatakan bahwa pemetaan dilakukan oleh RT bersama bapak-bapak. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dikatakan salah seorang informan dari RT/RW 02/15.

“Meskipun saya tahu ada bina sosial, tetapi saya tidak pernah ikut dalam perumusan masalah. Saya jarang mengikuti pertemuan RT. Di rumah, yang sering menghadiri pertemuan RT adalah suami saya. Jadi saya tidak tahu sama sekali masalah yang dibicarakan dan saya pun tidak diberitahukan oleh suami” (Sit, Sep 2005).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh warga RT/RW 03/15 No 27, seperti kutipan di bawah ini:

“Meskipun saya ikut dalam sosialisasi PPMK, saya tidak ikut dalam perumusan masalah. Hal itu dibicarakan pada pertemuan RT dan dihadiri oleh bapak-bapak” (Sum, September 2005).

b. *Perencanaan*

Pada tahap perencanaan, partisipasi perempuan juga tidak terlihat. Dari hasil wawancara terlihat bahwa kaum perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan. Menurut mereka, perencanaan kursus yang dilaksanakan oleh kelurahan melalui dana PPMK tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Mereka pun tidak semuanya mengetahui ada kursus. Mereka mengetahui ada kursus pun setelah kursus dilaksanakan dan tetangga mereka ikut kursus tersebut.

Sementara itu, pihak Dekel sendiri mengatakan bahwa perencanaan kursus yaitu jenis kursus yang dibutuhkan adalah berdasarkan selebaran yang disebar kepada warga. Selebaran ini diberikan ke warga melalui TPK dan RT. Warga diminta untuk mengisi selebaran tersebut.

c. *Pelaksanaan*

Kalau dilihat dari tahap pemetaan dan perencanaan ternyata dari informan perempuan yang diwawancarai tidak terlihat adanya partisipasi perempuan. Namun demikian, dalam pelaksanaan kursus, terlihat ada partisipasi perempuan. Terutama sekali pada kursus menjahit, MC dan hantaran pengantin Betawi (tata boga). Dari pengamatan lapangan memang terlihat bahwa kursus menjahit dilaksanakan di sekretariat Dekel Klender. Selain itu, dari laporan hasil *monitoring* PPMK tahun 2001-2004 tercatat jumlah peserta kursus menjahit adalah 200 orang dan kursus MC serta hantaran 112. Sedangkan untuk kursus hantaran dikelola sendiri oleh PKK kelurahan. Selain dari dua kursus ini, perempuan juga berpartisipasi pada kursus komputer, terutama sekali perempuan yang baru lulus SLTA atau duduk di bangku kelas II SLTA.

d. *Evaluasi*

Pada tahap keempat ini, dari temuan lapangan, hampir sama dengan tahap pertama dan kedua, yaitu tidak ada sama sekali partisipasi perempuan. Mereka mengakui bahwa selama ini tidak pernah dilibatkan. Sepengetahuan mereka pun, tahap ini tidak pernah dilaksanakan.

2. Bina Fisik

Anggaran untuk bina fisik dialokasikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Dari data yang diperoleh, pembangunan fisik ini antara lain adalah memperbaiki selokan, membangun WC umum, mengaspal jalan setapak dan membangun balai pertemuan.

Bagaimana gambaran partisipasi perempuan pada bina fisik dapat dilihat dari uraian di bawah ini:

a. *Assessment*

Partisipasi perempuan pada tahap ini hampir sama dengan pada bina sosial. Perempuan tidak ikut dalam pemetaan masalah. Mereka mengetahui ada pembangunan di daerahnya setelah proses pelaksanaan.

b. Perencanaan

Partisipasi perempuan pada tahap ini juga tidak ditemukan. Menurut mereka, perencanaan dibuat oleh RT atau beberapa anggota masyarakat laki-laki dengan pihak RT. Hal ini bisa dilihat dari hasil kutipan wawancara dengan Ketua RT 05 RW 01.

“Proses perencanaan bina fisik saya lakukan bersama dengan pengurus RT saja. Alasannya, permasalahan fisik itu sudah diketahui berdasarkan pembicaraan sebelumnya dengan warga dan hasil keluhan warga” (Dal, 2005).

Selain itu, tidak tergambar partisipasi perempuan pada perencanaan bina fisik juga bisa dilihat dari kutipan wawancara dengan salah seorang warga RT/RW 13/03 yang perempuan.

“Saya tidak tahu ada pembangunan apa, tiba-tiba ada gotong royong membangun WC dan selokan.” (Ras, Agus 2005).

c. Pelaksanaan

Berbeda halnya dengan tahap pemetaan dan perencanaan, pada tahap pelaksanaan bina fisik, perempuan banyak yang berpartisipasi. Mereka pada umumnya berpartisipasi dalam betuk benedat, yaitu makanan kecil. Seperti yang dikatan Raas, warga RT/RW 13/03:

“Saya ikut membantu dalam pembangunan fisik tersebut, yaitu makanan kecil dan minuman.

Hal senada juga diungkapkan warga perempuan yang lain:

“Saya tidak pernah terlibat dalam pemetaan, perencanaan dan evaluasi. Saya hanya terlibat dalam pelaksanaan bina fisik, yaitu menyumbang makanan.” (Kar, RT/RW 05/01, 2005)

d. Evaluasi

Pada tahap keempat ini, dari temuan lapangan, hampir sama dengan bina sosial. Pada tahap ini tidak ada sama sekali partisipasi perempuan. Mereka mengakui bahwa selama ini tidak pernah dilibatkan. Sepengetahuan mereka pun, tahap ini tidak pernah dilaksanakan.

3. Bina Ekonomi

Bantuan langsung pemerintah melalui bina ekonomi ini adalah berupa pinjaman bergulir. Masyarakat yang boleh meminjam adalah penduduk Jakarta dibuktikan dengan KTP dan memiliki usaha atau berencana membuka usaha. Bantuan ini diterima warga setelah melalui tahap seleksi dan pemantauan oleh pihak Dekel. Besarnya bantuan ini diterima warga tergantung dari jenis usaha yang dibuka, yakni berkisar antara Rp500 ribu-Rp20 juta.

Gambaran partisipasi perempuan pada bina ekonomi dapat dilihat di bawah ini:

a. *Assessment*

Partisipasi perempuan pada tahap ini hampir sama dengan pada bina sosial dan bina fisik. Perempuan tidak ikut dalam pemetaan masalah. Bahkan, sebagian dari mereka mengetahui ada bina ekonomi dari tetangganya.

Kalau dilihat dari pedoman pelaksanaan PPMK dan realisasinya, bina ekonomi tidak ada tahap pemetaan masalah. Masyarakat sudah dibertahukan oleh pihak Dekel dan TPK adanya bantuan dana bergulir.

b. Perencanaan

Partisipasi perempuan pada tahap ini juga sama dengan tahap pemetaan. Warga, termasuk perempuan, sudah disediakan borang pengisian peminjaman. Mereka tinggal mengisi jumlah pinjaman dan jenis usaha yang dibuka.

c. Pelaksanaan

Pada pelaksanaan bina ekonomi, ternyata perempuan banyak yang berpartisipasi, sama halnya dengan pelaksanaan bina sosial. Mereka ikut berpartisipasi menggunakan dana bergulir. Selain itu, mereka juga berpartisipasi dalam pengembalian dengan tepat waktu.

Adanya partisipasi perempuan itu dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan beberapa orang dari mereka.

"Ketika mendengar informasi tersebut, saya pun berminat karena persyaratannya mudah, cicilan dan bunganya ringan." (Sum, RT/RW 03/15 No. 27, 2005)

"Saya sudah meminjam sampai tiga kali. Dana tersebut saya gunakan untuk menambah modal usaha semuanya." (Tum, RT 04/03 Agus 2005)

"Meskipun saya buta huruf, saya tetap dapat meminjam. Saya dapat mengisi formulir dibantu oleh anak. Usaha saya pun berlanjut dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan nasi (wartek) meskipun tidak ada suami." (Ras, RT/RW 13/03, 2005)

d. Evaluasi

Pada tahap keempat ini, dari temuan lapangan, hampir sama dengan bina sosial dan fisik. Pada tahap ini tidak ada sama sekali partisipasi perempuan. Untuk bina ekonomi ini, pihak TPK/UPK RW memberikan laporan kepada Dekel.

Gambaran Partisipasi Perempuan dalam Mengetas Kemiskinan Melalui PPMK

Dari paparan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan PPMK untuk mengetas kemiskinan ternyata hanya pada beberapa tahap untuk ketiga bina tersebut, yakni hanya pada tahap pelaksanaan saja. Meskipun demikian, dari hasil wawancara ternyata perempuan yang berpartisipasi pada bina sosial dapat membantu perekonomian keluarga, yaitu dengan bekal kursus mereka bisa bekerja atau membuka usaha sendiri. Hal ini sudah membantu dalam pengetasan kemiskinan.

Seperti kutipan wawancara dengan Dekel Klender (Feb2006):

Meskipun kita tidak melakukan pendataan berapa dari mereka yang ikut kursus sudah bekerja dan berapa yang belum, kita bisa melihat dan dari hasil laporan TPK dan RW masing-masing. Dari laporan,

ternyata banyak dari perempuan peserta kursus menjahit yang sudah bekerja. Mereka ada yang buka usaha terima pesanan jahitan dan ada juga yang bekerja di konveksi sebagai tenaga kerja di kawasan Pulo Gadung. Hal ini membantu perekonomian keluarga mereka, karena ada di antara mereka yang suaminya di PHK.

Begitu juga pada bina ekonomi, partisipasi perempuan dalam pemanfaatan dana bina ekonomi, yakni dengan membuka usaha sangat membantu perekonomian keluarga. Usaha mereka banyak yang berjalan atau maju. Mereka sudah bias membantu perekonomian keluarga. Bahkan ada yang sudah bisa memberikan peluang pekerjaan, seperti pelayan toko.

Meskipun ada di antara mereka yang gagal dan melakukan penyimpangan dana. Seperti kutipan wawancara dengan seorang ibu rumah tangga.

Saya menggunakan uang pinjaman itu untuk membayar kontrak rumah. Selama ini saya selalu kesulitan untuk membayar kontrakan yang jumlahnya cukup besar. Alasan saya lainnya adalah penambahan modal untuk berdagang nasi udak tidak akan menambah penghasilan karena pembelinya tidak bertambah. (Sun, RT/RW 07/03, Feb 2006)

Modal tersebut saya gunakan untuk dagang sayur hanyalah sepertiganya sedangkan sisanya saya gunakan untuk membeli televisi. Anak saya minta televisi bekas, sedangkan saya tidak punya suami lagi. (Suy, RT/RW 08/03, Feb 2006)

Kendala Partisipasi Perempuan

Seperti yang dikemukakan di awal, bahwa partisipasi masyarakat tidak bisa berjalan mulus. Masyarakat dihadapi oleh berbagai kendala dalam berpartisipasi. Kendala tersebut ada berasal dari luar individu ada juga dari luar individu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Watson (Adi, 2003: 306-319) bahwa kendala dalam diri individu ada empat, yakni superego, rasa tidak percaya diri, rasa tidak aman, seleksi ingatan dalam diri individu, sikap apatis dan ketergantungan. Sementara itu, kendala di luar individu adalah hambatan dari masyarakat dan pemerintahan.

Dari hasil temuan lapangan, kendala yang paling banyak ditemukan adalah dalam diri perempuan itu sendiri, yaitu sikap ketergantungan dengan orang lain. Dalam hal ini, perempuan sangat bergantung pada suaminya.

Kendala berpartisipasi perempuan dalam PPMK itu dapat dilihat dari kutipan wawancara di bawah ini:

Saya sudah tua dan tidak mungkin ikut pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan malam. Jadi suami saja yang ikut. Saya mengalami kendala dalam pengembalian pinjaman tersebut karena uangnya habis untuk membuka kebun di Bayutan. Namun, kebun itu habis terkena banjir. Sementara suami saya sakit-sakitan. (Ani, RT/PW 10/01 No 22, Agus 2005)

Terus terang saya tidak bisa terlibat dalam pemantauan, perencanaan dan pelaksanaan program. Kendala saya karena sangat disibukkan oleh usaha dagang. Setiap ada pertemuan atau acara, suami saya yang ikut. Dalam pelaksanaan fisik, suami saya sering ikut membantu (San RT/RW 04/15 NO. 28A, Agus 2005)

Saya tidak bisa berpartisipasi dalam pengembalian dan pinjaman karena dagangan saya habis terkena banjir. Sementara untuk meminjam tidak bisa lagi, karena peraturannya begitu. Saya harus melunasi terlebih dahulu pinjaman yang lama. (Sor, RT/RW 10/01, Agus 2005)

Kendala dalam diri perempuan yang lainnya adalah rasa malu karena kondisinya, seperti kutipan wawancara di bawah ini:

Saya malu berkumpul karena harus ada uang. Berkumpul itu dalam rangka arisan sekaligus. Saya ngak bisa bayar arisan. Saya mah orang miskin, ngak punya uang. Dari pada saya malu lebih baik saya tidak ikut beklumpul. Apalagi suami saya menggur. (Sam, RT/RW 08/03, Feb 2006)

Sementara kendala di luar diri perempuan itu sendiri adalah peraturan yang ditetapkan pemerintah. Mereka yang boleh berpartisipasi dalam bina ekonomi haruslah penduduk Jakarta yang memiliki KTP. Sementara itu, banyak di antara mereka yang tidak memiliki KTP, meskipun mereka sudah tinggal di sana sejak tahun 1960-an. Selain itu, mereka tidak bisa meminjam kembali kalau masih menunggak. Berdasarkan hasil temuan lapangan, mereka menunggak bukan tidak ada keinginan untuk membayar, tetapi usaha mereka hancur karena terkena musibah, seperti yang dikatakan Ani.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai anggota masyarakat, perempuan juga ikut dalam pembangunan. Keterlibatan perempuan itu dapat dilihat dari partisipasi perempuan dalam PPMK. Sebagai sebuah program, PPMK difokuskan pada tribina, yaitu bina sosial, fisik dan ekonomi.

Untuk melihat gambaran partisipasi perempuan dalam mengetas kemiskinan melalui PPMK, dilakukan dengan definisi partisipasi yang digunakan Adi (2003). Menurutinya, partisipasi masyarakat dapat dilihat pada empat tahap, yaitu: melalui tahap pemetaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Dari hasil temuan lapangan, ternyata partisipasi perempuan tidak ada berpartisipasi pada tahap pemetaan, perencanaan dan evaluasi. Partisipasi mereka ada pada tahap pelaksanaan, khususnya pelaksanaan bina sosial dan bina ekonomi. Partisipasi perempuan tersebut ternyata ada yang bisa membantu dalam mengetas kemiskinan. Dengan bekal keterampilan yang diberikan, mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri atau menjadi karyawan kerja di perusahaan konveksi. Hal ini bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Sementara itu, partisipasi perempuan pada pelaksanaan bina ekonomi juga membantu perekonomian keluarga mereka. Usaha mereka pun banyak yang berjalan lancar.

Meskipun demikian, ternyata perempuan juga mengalami kendala dalam berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya melalui PPMK. Kendala tersebut terutama dari dalam diri mereka, yaitu sikap ketergantungan dengan orang lain (suami atau anak laki-laki). Mereka tidak pernah mengikuti pertemuan untuk pemetaan dan perencanaan sebuah program yang dilaksanakan oleh RT. Selain itu, kendala juga berasal dari luar diri perempuan, yakni peraturan PPMK. Mereka yang boleh meminjam hanyalah yang memiliki KTP dan boleh meminjam lagi kalau tidak melakukan tunggakan.

Saran

Berdasarkan temuan lapangan, yaitu partisipasi perempuan hanya pada tahap pelaksanaan dan terjadinya kendala dalam berpartisipasi, saran penulis adalah:

1. Setiap ada musyawarah pembangunan, yang diundang tidak harus laki-laki (kepala keluarga).
2. Musyawarah jangan dilaksanakan pada jam sibuk, ataupun terlalu malam hari, mungkin bisa antara habis salat magrib dan sebelum salat isa.
3. Agar perempuan tidak melakukan penunggakan atau kendala berpartisipasi dalam peminjaman dan pengembalian, perlu dibuat syarat yang lebih ringan agar bisa meminjam dan diberikan pengarahan dalam membuka usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Suherman Djaenudin, penyuting. 1993. *Seminar Sehari Pengetasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pemerataan Hasil Pembangunan*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Batam Pos. 39,5 Juta rakyat masih miskin. Hari Sabtu, 2 September 2006.
- BPS DKI. Info Penduduk Jakarta(<http://bps.jakarta.go.id>) (April 2005)
- BPS. 2002. *Pengembangan Metode Penghitungan Pengagguran: Pengagguran Terbuka dan Setengah Pengagguran di Indoneisa 2000-2002*. Jakarta: BPS, katalog 3425.
- Jurnal Perempuan Edisi 42. Prolog.
(http://www.kutukutubuku.com/category86/product4999/product_info.htm?oscsid=9) (4 September 2007)
- Koretan, David C. 2002. *Menuju Abad ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kompas Cyber Media (KCM). Profil Kemiskinan Ibu Kota. (Kamis 21 April 2005).
- Mikelsen, Britha. 1999. *Metoda Penelitian Partisipasi dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Moleong, Lexy. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosakarya.
- Rachbini, Didik J. et. al. 1995. *Negara dan Kemiskinan di Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sumodiningrat, Gunawan, Budi Santosa dan Muhammad Maiwan. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC.
- Supriatna, Tjahya.1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengetasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora UtamaPress.